

BAB I

PENDAHULUAN

Inggris merupakan negara monarki di Eropa, meliputi wilayah England, Skotlandia, Wales, Irlandia Utara. Inggris merupakan sebuah negara dengan sistem Monarki Konstitusional dan Demokrasi Parlementer. Ratu dan Raja yang memerintah Inggris adalah sebagai kepala negara, namun kekuasaannya sangat terbatas dan lebih bersifat kehormatan. Kekuasaan eksekutif berada ditangan Perdana Menteri, yaitu ketua mayoritas partai dalam parlemen, dan ketua kabinet. Parlemen Inggris disebut juga "*Mother of Parliament*". Sebab banyak pembuat undang-undang di negara lain meniru Inggris.¹

Keikutsertaan Inggris di bawah pimpinan perdana menteri Tony Blair mengalami banyak pro dan kontra terutama pada partai maupun masyarakat. Tony Blair mengalami dilema apakah ia harus terus maju untuk mendukung Amerika menginvasi Irak atau bergabung dengan kekuatan Eropa yang lain untuk menolak invasi tersebut.

Pada tanggal 18 Maret 2003, dari 150 anggota partai Buruh yang duduk diparlemen Inggris, 139 orang dari anggota partai Buruh yang sepakat untuk menentang rencana aksi terhadap Irak dan hanya 11 orang yang setuju, namun Tony Blair tetap pada pendiriannya dan yakin masyarakat akan percaya bahwa yang ia lakukan adalah kebijakan luar negeri yang sudah tepat secara moral walaupun ditentang oleh DK PBB.²

¹ Ensiklopedia Indonesia Seri Geografi, Jakarta, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1990, hal. 90

² Jonnes, Bill, *The Mass Media and Political Communication*, dalam Politik UK, England, PEL, 2004, hal. 691

A. Latar Belakang Masalah

Irak yang merupakan kawasan strategis penambangan minyak, berada di bawah kendali pasukan Inggris sejak invasi tahun 2003, namun administrasi pemerintah dan bandara telah dikembalikan kepada Irak sejak tiga bulan setelah Inggris berada di Irak. Sebagaimana melatih tentara Irak, Inggris juga berperan penting melahirkan kembali kekuatan angkatan laut Irak. Pelatihan yang dilakukan Angkatan Laut Kerajaan Inggris itu berpusat di selatan pelabuhan Umm Qasr. Peranan mereka diharapkan masih akan terus berlanjut meskipun perjanjian baru belum dicapai oleh kedua pemerintahan.³

Invasi yang dilakukan Inggris terhadap Irak tidak hanya menjadi solusi atau penyelesaian yang diharapkan atas permasalahan yang dihadapi (perkiraan akan ancaman senjata pemusnah massal yang dimiliki Irak), namun juga menimbulkan beberapa implikasi lanjutan, tidak hanya pada negara-negara yang terlibat krisis atau peperangan tapi juga pada sistem percaturan global. Perubahan tersebut dapat menjadi sebuah indikasi akan adanya pergeseran sistem internasional unipolar atau multilateralisme akibat terjadinya krisis Irak tersebut.

Keinginan untuk menyerang Irak bermula dari kesepakatan yang dilakukan oleh dua negara yaitu AS dan Inggris. Pada pertemuan tersebut kesepakatan tindakan perang terhadap Irak mulai terbentuk antar kedua negara ini. Pada tanggal 5 Februari 2003, Collin Powell membeberkan data intelijen AS mengenai persenjataan kimia dan biologi serta mengembangkan misil dan nuklir yang bertentangan dengan ketentuan PBB.

³ <http://beta.redlasso.com/Community>, diakses Oktober 9th, 2007 at 10:30 am

Inggris sebagai salah satu sekutu AS selain Spanyol dalam kasus Irak ini, sejak awal sikap Inggris yang mendukung AS untuk menyerang Irak telah terlihat. Hal tersebut tampak ketika tanggapan DK PBB terhadap laporan Hans Blix dan Collin Powell mengenai hasil intelijen tersebut terbelah dua. AS didukung oleh sekutu terdekatnya yaitu Inggris masih beranggapan bahwa pihak Irak telah menyembunyikan bukti-bukti dan data yang penting. Inggris termasuk kedalam negara-negara yang sangat mendukung kebijakan Amerika untuk menyerang Irak. Mereka bersikeras dengan data intelijen mereka yang merupakan hasil pantauan dari satelit dan menginginkan aksi militer untuk menghadapi Irak.

Berdasarkan pada pendapat tersebut, AS dan Inggris serta negara-negara sekutunya berupaya mengusulkan resolusi kedua kepada DK PBB yang isinya memperbolehkan aksi militer terhadap Irak. Di lain pihak, Perancis bersama Jerman, Rusia dan juga Cina berpendapat untuk membiarkan Hans Blix dan timnya menyelesaikan dulu tugas mereka hingga tuntas dan cenderung mempercayai laporan tim inspeksi PBB.

Sikap Perancis di dalam Dewan Keamanan PBB ternyata telah menyulitkan Inggris untuk mengendalikan lembaga yang selama ini berhasil mengeluarkan resolusi-resolusi yang sesuai dengan kepentingannya. Inggris dan AS bahkan dengan jelas mengatakan bahwa Perancis sebagai ganjalan utama dan menyatakan kekecewaannya terhadap mantan sekutunya tersebut. Perancis yang menentang rencana perang AS dan Inggris beserta sekutunya tersebut membuat AS dan Inggris tidak bisa mendapatkan ijin PBB berupa resolusi DK PBB untuk menyerang Irak akibat ancaman beberapa negara pemegang hak veto seperti Perancis, Rusia dan Cina untuk menggunakan haknya.

Reaksi negatif dari beberapa negara Eropa, khususnya Eropa Barat yang kuat secara ekonomi dan militer terhadap usulan memerangi Irak yang diusung oleh Amerika Serikat telah menjadi penanda bahwa negara-negara Eropa mulai tak sejalan dengan Amerika Serikat dan terlihat ingin menunjukkan eksistensi dan pendapat mereka sendiri tanpa dibayang-bayangi pengaruh Amerika. Mengingat selama ini negara-negara Eropa, khususnya Eropa Barat selalu mengikuti kehendak dan pendapat Amerika Serikat.

Peta dukungan di Dewan Keamanan PBB tersebut tampak tak berimbang di mana hanya empat dari lima belas negara anggota DK PBB yang menginginkan aksi militer yaitu Amerika Serikat, Inggris, Spanyol dan Bulgaria. Sedangkan sebelas anggota lainnya menginginkan inspeksi lanjutan dari PBB yaitu Prancis, Rusia, Cina, Jerman, Meksiko, Chile, Guinea, Kamerun, Syria, Angola dan Pakistan. Sikap mayoritas anggota DK PBB ini terwakili oleh pernyataan Duta Besar Perancis untuk PBB yaitu Jean-marc de la Sabliere yang menyatakan bahwa mayoritas anggota dewan menganggap bahwa inspeksi masih perlu dilakukan.⁴

Namun, meski berada di pihak minoritas di DK PBB, Inggris tetap ber-sikeras mendukung AS. Komitmen Inggris untuk mendukung invasi AS ke Irak tersebut menguat ketika pada tanggal 16 Maret 2003 diadakan pertemuan puncak di Lajes, Terceira, Kepulauan Azores, Portugal, yang dihadiri Presiden Amerika Serikat George W. Bush, Perdana Menteri Inggris Tony Blair, dan Perdana Menteri Spanyol Jose Maria Aznar. KTT tersebut untuk mengatasi jalan buntu resolusi kedua tentang Irak di DK PBB.

⁴ Republika, 31 Januari 2003

Segera setelah 48 jam dari ultimatum yang diberikan Presiden Amerika Serikat kepada Saddam Hussein berakhir, dimulailah invasi militer AS ke Irak pada tanggal 20 Maret 2003. Penyerangan pun didukung oleh negara-negara sekutu AS di Eropa Barat, tidak terkecuali Inggris. Inggris adalah salah satu dari sedikit negara anggota DK PBB (selain Spanyol) yang mendukung invasi AS ke Irak. Sikap yang menentang arus mayoritas tersebut tentu tidak lepas dari penentangan oleh negara-negara anggota lain, namun Inggris tetap pada pendiriannya.

Dalam konferensi pers, Perdana Menteri Inggris mengatakan: “Kami berharap dalam penandatanganan kesepakatan dengan pemerintah Irak untuk peran di masa depan yang dapat memainkan peran dalam pelatihan, dan perlindungan pasokan minyak Irak. Semua ini akan menjadi kesepakatan antara dua pemerintah, dan bukan lagi keputusan dari PBB”⁵.

Inggris, di bawah kepemimpinan Tony Blair dulu, merupakan sekutu kunci AS ketika mantan presiden AS George W. Bush, memerintahkan pasukannya untuk menginvasi Irak dalam rangka menghabisi kekuasaan Saddam Hussein. Jumlah pasukan Inggris dalam kampanye memerangi terorisme merupakan yang kedua terbesar, Pada masa awal-awal invasi Amerika Serikat dan Inggris ke Irak pada Maret-April 2003, Inggris mengirim setidaknya 46.000 pasukan bertujuan menggulingkan Saddam Hussein dan mencari senjata pemusnah massal andala n Saddam Hussein.

⁵ Inggris pernah bahas soal minyak sebelum ikut menginfasi ke Irak, dikutip dari <http://adam99hafiz.wordpress.com/2011/04/20>.

Keputusan Perdana Menteri Inggris Tony Blair untuk mendukung invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 merupakan keputusan paling kontroversial selama 10 tahun kepemimpinan Tony Blair. Blair juga dituduh telah menipu masyarakat Inggris terkait alasannya mendukung AS pada tahun 2003 dalam invasi di Irak ketika senjata pemusnah massal tidak ditemukan. Namun pada tahun 2007 Tony Blair memutuskan untuk menarik pasukannya dari Irak, dimana penarikan pasukan Inggris tersebut dilakukan melalui beberapa tahap penarikan yaitu tepatnya pada tahun 2007, 2008 dan 2009.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka pokok permasalahan yang akan dibahas ialah: “ **Mengapa Inggris menarik pasukannya dari Irak Pada Tahun 2007 - 2009?** ”

C. Tujuan Penelitian

- Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjawab perumusan masalah yang ada dengan teori yang relevan dan membuktikan hipotesa, tentang kebijakan Inggris untuk menarik pasukannya dari kancah perang Amerika Serikat-Irak.
- Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dibatasi sejak dimulainya penarikan pasukan Inggris dari Irak pada tahun 2007 hingga tahun 2009. Namun tidak menutup kemungkinan digunakannya data-data selain waktu tersebut sebagai dukungan penjelasan.

E. Landasan Teori

Untuk memahami fenomena dalam Hubungan Internasional, maka perlu adanya menggunakan sebuah teori. Teori adalah bentuk penyelesaian paling umum yang memberitahukan kita mengapa terjadi sesuatu. Teori menggambarkan serangkaian konsep menjadi satu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu berhubungan. Dari uraian yang telah dijelaskan di latar belakang tersebut maka untuk menganalisa masalah motivasi Inggris menarik pasukannya dari Irak, penulis menggunakan Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri.

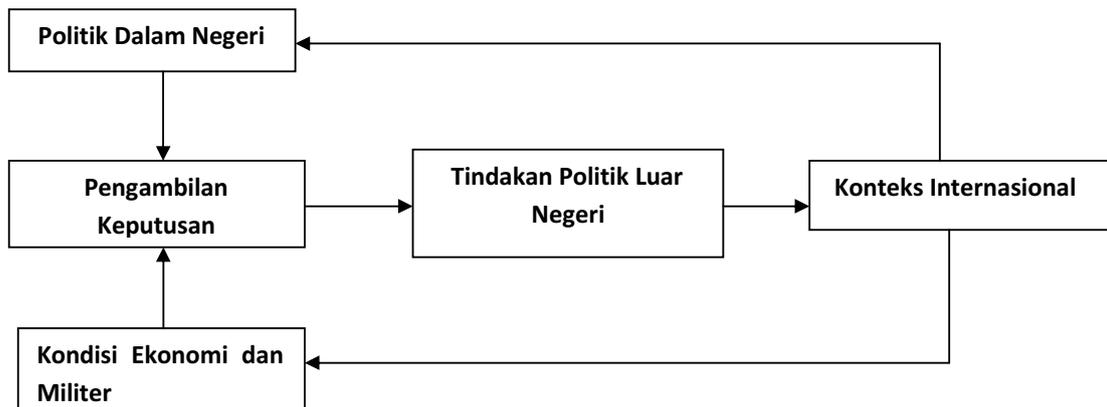
1. Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri

Berdasarkan teori pembuatan keputusan, politik luar negeri bisa dipandang sebagai output dari tiga pertimbangan yang mempengaruhi para pengambil keputusan luar negeri. Tiga pertimbangan itu adalah, (1) Kondisi politik dalam negeri (*Domestic politic*), (2) kemampuan ekonomi dan militer (*Military Economic Capability*) dan (3) Konteks Internasional (*Internasional Context*) yaitu posisi Negara dalam hubungannya dengan Negara lain dalam sistem internasional itu.

Menurut William D Coplin, Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri atau Foreign Policy yaitu:

“Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar. Dan salah besar jika menganggap para pembuat kebijakan luar negeri bertindak tanpa pertimbangan (konsiderasi). Tetapi sebaliknya, tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsederasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan luar negeri: Pertama, kondisi politik luar negeri termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya. Kedua, situasi ekonomi dan militer di negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan/keamanan. Ketiga, konteks internasional (situasi di negara yang menjadi politik luar negeri serta pengaruh dari negara - negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi) ”.⁶

Gambar 1.1 : Pengambilan Kebijakan Luar Negeri William D Coplin



Berdasarkan kerangka teori diatas, penulis akan menerapkan paling tidak 3 faktor yang membuat penarikan pasukan Inggris dari kancah perang AS-Irak tahun 2007-2009 yaitu :

A. Kondisi Politik Dalam Negeri

Kondisi domestik memiliki pengaruh dalam menentukan *output* kebijakan luar negeri suatu Negara, termaksud budaya dan system politik yang berjalan beserta variable-variabel yang mempengaruhinya. Dalam kasus Inggris, konteks situasi lokal yang mendasari sikap Inggris adalah Blair mengumumkan pengunduran dirinya dari Sedgefield, wilayah konstituennya yang terletak di bagian timur laut Inggris awal Mei lalu. Ia akan meninggalkan kantornya di Downing Street yang sudah ia singgahi selama 10 tahun. Pengunduran diri Blair yang jabatannya seharusnya berakhir pada 2009 atau 2010 ini disinyalir terkait dengan anjuran dan desakan beberapa pejabat junior di pemerintahan agar ia mundur pada September 2007.

Desakan itu diperkuat dengan kekalahan Partai Buruh dalam beberapa pemilu lokal di seluruh Inggris awal Mei lalu. Bahkan, Partai Buruh kalah di Scotlandia dan Wales yang merupakan basis pendukungnya, Sementara itu Parlemen Inggris serta merta mendesak pemerintahnya supaya menarik pasukan dari Iraq agar tidak mendatangkan korban lebih banyak kepada pasukan Inggris di masa yang akan datang, serta banyaknya tekanan dari masyarakat Inggris yang mengecam perang di Irak dan seringnya terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh pengunjuk rasa anti perang, sehingga semua tekanan tersebut membuat Tony Blair mengundurkan diri dari jabatannya.

B. Kondisi Militer dan Ekonomi

Kondisi militer suatu Negara sangat berperan sekali dalam mempengaruhi, merumuskan dan melaksanakan politik luar negeri suatu Negara kuat lemahnya struktur militer dan karakteristiknya dapat menjelaskan kemana arah orientasi kebijakan luar negerinya. Begitu juga dengan kondisi perekonomian yang ada dalam Negara tersebut. Sistem ekonomi suatu Negara (baik liberal, komunis maupun

⁶ William D Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis* (Bandung: Sinar Baru, 1992) hal.30

campuran) mempunyai korelasi positif dengan kebijakan luar negeri suatu Negara.

Dalam bidang ekonomi, Setiap pemerintahan di dunia pada umumnya mempunyai tujuan untuk memajukan dan mengembangkan kepentingan ekonomi negaranya. Tujuan yang meliputi upaya peningkatan kesejahteraan social dan ekonomi masyarakatnya merupakan hal utama dalam politik luar negerinya semenjak 6 tahun Inggris berada di Irak. Inggris menderita kerugian berupa tewasnya 179 orang tentara dan pembengkakan biaya perang hingga mencapai 8,5 milyar Poundsterling atau setara dengan 16 milyar dolar.

Dalam bidang militer, akibat dari ketidakstabilan ekonomi Inggris, terjadi pengurangan dana anggaran untuk militer yang menyebabkan dan menimbulkan pengaruh besar pada kekuatan militer Inggris. Sementara itu Parlemen Inggris serta merta mendesak pemerintahnya supaya menarik pasukan dari Irak agar tidak mendatangkan korban lebih banyak kepada pasukan Inggris di masa yang akan datang.

Inggris mengirim setidaknya 46.000 pasukan. Bertujuan menggulingkan Saddam Hussein dan mencari Senjata Pemusnah Massal andalan Saddam. Tujuan pertama sukses, namun tujuan kedua sama sekali tak terbukti yaitu tidak ditemukannya senjata pemusnah massal tersebut yang dimana hal tersebut yang menjadi tujuan utama AS dan Inggris untuk menginvasi Irak. Pasca jatuhnya rezim Saddam, Irak makin terbelah oleh banyaknya pemberontakan dan perang sipil terutama konflik antara Sunni dan Syiah.

C. Konteks Internasional

Konteks internasional disini mengacu pada sistem global yang terbentang saat ini. Artinya hubungan yang menunjuk pada hubungan saling ketergantungan antara unsur-unsur dalam komponen yang satu dengan yang lainnya. Perubahan pada suatu komponen akan mempengaruhi komponen yang lainnya. Konteks internasional menyangkut faktor-faktor geografis, ekonomi dan politis. Geografis penting dalam menetapkan konteks internasional suatu negara dalam bidang yang berkaitan seperti logistic, militer, perdagangan dan lain sebagainya. Jika terdapat pengaruh dari konteks internasional terhadap kondisi ekonomi dan militer yang selanjutnya mempengaruhi para pembuat kebijakan yang akan diambil dalam wujud tindakan politik luar negeri.

Sebelum AS dan Inggris melancarkan pasukannya ke Irak, angin terorisme internasional telah begitu kencang menerpa banyak negara-negara di berbagai belahan dunia. Pasca invasi, terorisme internasional ternyata telah sampai di wilayah Eropa. Serangan bom di Madrid, yang menewaskan sedikitnya 190 orang dan melukai lebih dari 1.500 lainnya, menjadi isyarat bahwa terorisme telah berada di pekarangan Eropa.

Inggris yang mendukung AS dalam invasi ke Irak berharap mendapatkan keuntungan yang besar dari minyak dan pembangunan pasca perang dan lain sebagainya. Ternyata pemerintah Inggris hanya mengeluarkan banyak biaya dan tidak ada keuntungan atau hasil yang didapat oleh Inggris dalam keikutsertaannya bersama AS ke Irak. Dengan mempertimbangkan kerugian yang didapat oleh pemerintah Inggris dalam keikutsertaannya bersama Amerika Serikat selama masa invasi. Maka, untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi pemerintah Inggris memutuskan untuk menarik pasukannya dari koalisi pasukan gabungan yang dipimpin oleh AS.

F. Hipotesis

Berdasarkan kerangka dasar teori dan fakta-fakta tersebut, maka dapat dirumuskan jawaban sementara dari pokok permasalahan. Maka kebijakan Inggris untuk menarik pasukannya dari kancah perang AS-Irak tahun 2007-2009 disebabkan faktor - faktor Internal Inggris yaitu :

1. Kondisi politik dalam negeri Inggris, dimana menurunnya dukungan terhadap Tony Blair serta naiknya jumlah anggota partai Buruh di parlemen yang kontra kebijakan Blair terhadap Irak.
2. Kondisi Ekonomi dan Militer Inggris, dimana pemerintah Inggris merasa tidak ada keuntungan yang didapat dari perang Irak, sementara sudah banyak mengeluarkan biaya untuk pasukannya yang berada di Irak .

G. Sistematika Penulisan :

BAB I : Dalam bab ini akan membahas pendahuluan yang berisi ringkasan singkat dari keseluruhan bab yang ada. Di dalamnya berisi alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini akan membahas tentang isu sosial dan politik dalam negeri Inggris yang meliputi Sistem Politik Inggris .

BAB III : Dalam bab ini akan membahas tentang Partai Buruh , dimana menurunnya dukungan terhadap Blair dalam pemilihan parlemen Inggris Tahun 2004.

BAB IV : Dalam bab ini akan membahas tentang kondisi ekonomi Inggris yang mempengaruhi penarikan pasukan Inggris dari perang Amerika Serikat -Irak Tahun 2003-2007.

BAB V : Berisi kesimpulan akhir dari hasil penggambaran dan penelitian skripsi ini yang merupakan penjelasan dari bab-bab sebelumnya.